



Kades Bingung Kelola Dana Desa

► LPM Gandeng BPK Gelar Pelatihan

JAKARTA, SP - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Republik Indonesia menilai masih banyak kepala desa yang belum siap menerima dan memaksimalkan dana desa. Karena itu LPM akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan pelatihan bagi kepala desa.

Pelatihan ini dilakukan agar kepala desa memahami prosedur administrasi. Sehingga dana desa bisa dipergunakan dengan semestinya karena LPM sebagai mitra pemerintah mempunyai peran penting dalam memajukan desa dengan membantu membuat program pembangunan dan penataan administrasi umum pedesaan.

"Banyak kepala desa yang belum siap menerima dana desa, disebabkan oleh sistem penggunaan anggaran yang belum baik, sehingga terjadi kebocoran," ujar Ketua Umum LPM Eni Maulani Saragih di Resto Pulau Desa, Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.

Sebagaimana dikemuka-



“ Eni Maulani Saragih
Ketua Umum LPM

Banyak kepala desa yang belum siap menerima dana desa, disebabkan oleh sistem penggunaan anggaran yang belum baik, sehingga terjadi kebocoran.

kan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dari sebanyak 74.958 desa yang menerima dana desa, hanya 10 persen yang mempunyai kapasitas kemampuan untuk mengelola.

Padahal, dalam menyusun rencana pembangunan, kepala desa memiliki peran besar dalam memutuskan rencana maupun program. Untuk membantu sistem administrasi berjalan lancar LPM akan bekerjasama dengan BPK.

"LPM akan bekerja sama dengan BPK melakukan pelatihan bagi kepala desa agar memahami prosedur administrasi. Salah satunya bagaimana mereka bisa membuat laporan yang benar terkait dana desa," kata Eni.

"Tapi kami tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan KPK juga untuk membuat pelatihan kepala desa dan kepala LPM di desa. Karena mereka selalu bersama untuk menginvestigasi masalah di desa dan akan dijadikan program," lanjutnya.

Eni mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan saja. Melainkan juga untuk membangun kekuatan ekonomi Indonesia.

"Bisa membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan keunggulan komperatif dan kompetitif yang dimiliki. Apabila ini berhasil dilakukan, maka akan mencegah terjadinya arus ur-



banisasi,” ucap Eni.

Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan laju urbanisasi tercepat di Asia. Diperkirakan hingga 2025 persentasinya akan mencapai 68 persen, sehingga jika tidak dicegah, kemungkinan yang tinggal di desa hanya orang jompo dan tidak produktif lagi.

“Karena itu LPM akan mengusulkan kepada pemerintah

agar dana desa yang dikururkan tiap bulannya tidak hanya untuk keperluan administrasi serta untuk membangun jalan dan jembatan, tapi juga bisa diberikan dalam bentuk pinjaman bergulir dengan bunga rendah yang bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai modal untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM),” jelas Eni. **(det/ang)**